

ANALISIS PENGUATAN MODAL SOSIAL DALAM MENGELOLA RISIKO KREDIT MACET: STUDI PADA KOPERASI MITRA MANINDO, MANDAILING NATAL, SUMATERA UTARA

(ANALYSIS OF SOCIAL CAPITAL STRENGTHENING IN MANAGING NON PERFORMING LOAN: STUDY OF MITRA MANINDO COOPERATIVE, MANDAILING NATAL, NORTH SUMATERA)

Lokot Zein Nasution

(Pusat Kebijakan Sektor Keuangan Badan Kebijakan Fiskal, Kementerian Keuangan,
Jl. Dr Wahidin Raya No. 1, Jakarta Pusat, 10710,
email: lokot.nasution@yahoo.com)

Naskah Diterima: 15 Juli 2018, direvisi: 15 Agustus 2018,
disetujui: 30 September 2018

Abstract

The performance of microcredit in Indonesia is the highest in the world, both in terms of program aspects and nominal financing. However, high performance is still accompanied by a high level of NPL, which still has a low impact on poverty reduction. This fact leads to the assessment that the expansion of the micro-credit program in Indonesia is basically still not managed ideally. Theoretically, the ideal governance of microcredit refers to the ability of the organization / company to capture the poor and be able to transform it into more prosperous. The only capital that is inherent in the poor is social capital, so optimizing it is governance that is considered ideal. Based on these problems, this study aims to find out how social capital can be the key to success in minimizing the risk of microcredit. Based on the Treatment Effect analysis conducted on 249 respondents, the results showed that the impact of social capital realized through group loans was a determinant factor in increasing the profitability of members' businesses. This success is due to the advantages of group loans that are able to create values of social capital, namely: (i) togetherness values; (ii) openness value; (iii) the value of deliberation; (iv) value of mutual trust; (v) discipline value; and (vi) the value of responsibility. The six values have impacted two important things, namely: (i) changes in member behavior; and (ii) the development of member businesses. The findings of this study can be a model in constructing the importance of social capital in minimizing the risk of microcredit.

Key Words: Micro Credit, Social Capital, Joint Liability Lending

Abstrak

Kinerja kredit mikro di Indonesia merupakan yang tertinggi di dunia, baik dari aspek program maupun nominal pembiayaan. Namun, kinerja yang tinggi masih diiringi dengan tingkat NPL yang juga tinggi, sehingga masih berdampak rendah terhadap pengurangan kemiskinan. Fakta ini mengarahkan pada penilaian bahwa ekspansi program kredit mikro di Indonesia pada dasarnya masih belum dikelola secara ideal. Secara teoritis, tata kelola Lembaga Keuangan Mikro (LKM) yang ideal mengacu pada kemampuan organisasi/perusahaan dalam menjangkau masyarakat miskin dan mampu mentransformasikannya menjadi lebih sejahtera. Modal satu-satunya yang melekat pada masyarakat miskin adalah modal sosial, sehingga mengoptimalkannya merupakan tata kelola yang dinilai ideal. Berdasarkan persoalan tersebut, maka penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana modal sosial mampu menjadi kunci keberhasilan dalam meminimalisir risiko kredit mikro. Berdasarkan analisa Treatment Effect yang dilakukan kepada 249 responden, hasilnya menunjukkan bahwa dampak modal sosial yang diwujudkan melalui pinjaman berkelompok merupakan faktor determinan dari peningkatan profitabilitas usaha anggota. Keberhasilan tersebut disebabkan keunggulan pinjaman berkelompok yang mampu menciptakan nilai-nilai modal sosial, yaitu: (i) nilai kebersamaan; (ii) nilai keterbukaan; (iii) nilai musyawarah; (iv) nilai saling percaya; (v) nilai disiplin; dan (vi) nilai tanggung jawab. Keenam nilai tersebut telah berdampak pada dua hal penting, yaitu: (i) perubahan perilaku anggota; dan (ii) berkembangnya usaha anggota. Temuan dari penelitian ini dapat menjadi percontohan dalam mengkonstruksi pentingnya modal sosial dalam meminimalisir risiko kredit mikro.

Kata kunci: Kredit Mikro, Modal Sosial, Pinjaman Berkelompok

PENDAHULUAN

Secara kinerja, ekspansi kredit mikro di Indonesia merupakan yang tertinggi di dunia, baik jumlah program maupun nilai pembiayaannya¹. Sejarah program kredit mikro di Indonesia sudah sejak lama dilaksanakan, yaitu sekitar tahun 1890an, jauh

lebih lama dari Pakistan (1950an), Filipina (1960an), India (1960an), Bangladesh (1970an), dan China (1990an)². Nilai pembiayaannya juga sangat tinggi, contohnya pada tahun 2007 masih sebesar Rp390,3 Triliun, kemudian tahun 2017 sudah meningkat

¹ Microfinance Market Outlook, *No Sudden Stop: Demand for Microfinance Soars*, Zurich: Responsibility Investment AG, 2013, hlm. 08.

² Milken Institute, *Sustainable Microfinance in Asia, Landscape, Challenges, and Strategies*, Washington: Milken Institute, 2014, hlm. 15.

menjadi Rp1.454 Triliun³. Nilai pembiayaan yang dimaksud termasuk total Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang disalurkan oleh perbankan nasional dan Bank Pembangunan Daerah (BPD). Nilai ini belum termasuk pembiayaan yang dikeluarkan oleh jenis Lembaga Keuangan Non-Bank (LKNB) dengan beragam sistem yang ditawarkan⁴. Artinya, masih ada potensi nilai pembiayaan kredit mikro di Indonesia jauh lebih tinggi. Meski nilai pembiayaan tinggi, namun tingkat NPL (*Non Performing Loan*) selama kurun waktu tahun 2006-2016 rata-rata selalu konsisten pada kisaran 4,5-5,5 persen⁵. Relatif masih tingginya tingkat NPL menjadikan tata kelola Lembaga Kredit Mikro (LKM) di Indonesia mendapatkan beragam kritik karena masih tingginya risiko kredit.

Relatif tingginya risiko kredit berdampak pada efek multiplier kredit mikro yang masih sangat rendah, khususnya terhadap laju penurunan kemiskinan. Data penyaluran KUR tahun 2012-2014 menunjukkan bahwa tren perkembangan jumlah debiturnya naik signifikan. Tetapi, jumlah penduduk miskin tidak mengalami tren penurunan yang berarti. Penyaluran KUR selama tahun 2012-2014 mencapai 6,36 juta nasabah⁶, namun penurunan jumlah penduduk miskin hanya sebesar 274,6 ribu jiwa⁷. Artinya, penurunan 1 (satu) penduduk miskin dibutuhkan upaya penyaluran KUR kepada 23 debitur baru. Kondisi ini menandakan bahwa pelaksanaan program kredit mikro kurang mempunyai pengaruh terhadap penurunan kemiskinan. Penetrasi kredit mikro di Indonesia terhadap total penduduk miskin masuk kategori sangat rendah (*very low*), yakni hanya 1,2%, kalah jauh dengan Bangladesh (32,5%), India (6,7%), Pakistan (5,2%), dan Filipina (2,0%)⁸. Fakta ini mengarahkan pada penilaian bahwa ekspansi program kredit mikro pada dasarnya masih belum dikelola secara ideal.

Secara teoritis, tata kelola LKM yang ideal mengacu pada kemampuan organisasi/perusahaan dalam menjangkau masyarakat miskin dan mampu mentransformasikannya menjadi lebih sejahtera⁹. Instrumen yang digunakan dalam mentransformasikan kesejahteraan adalah melalui

penyediaan akses kredit yang mudah dan berbiaya murah. Bukti empiris menunjukkan bahwa LKM yang ideal adalah mereka yang mampu menggabungkan mekanisme pengurangan risiko operasional (dalam mengelola debitur miskin) yang lebih efisien daripada yang dilakukan oleh lembaga perbankan¹⁰. Perbankan biasanya tidak menerima calon debitur miskin karena penuh dengan risiko, dan jika dipaksakan justru akan menimbulkan biaya transaksi yang tinggi¹¹. LKM dituntut agar mampu menjalankan roda kegiatannya secara lebih efisien, seperti efisiensi biaya pencarian informasi, minimalisasi risiko *adverse selection*, efisiensi biaya monitoring dan penegakan aturan, dan efisiensi biaya yang ditimbulkan oleh risiko moral¹². Masih tingginya risiko kredit dan dampak yang masih kecil terhadap penurunan kemiskinan menjadi cerminan bahwa para pelaku LKM di Indonesia rata-rata belum bisa menerapkan model pembiayaan yang dapat mengelola debitur miskin yang notabene memang penuh dengan risiko.

Beberapa peneliti menemukan relevansi yang kuat antara penguatan modal sosial sebagai pengganti kolateral dalam meminimalisasi risiko kredit skala mikro. Modal sosial antar calon debitur dijadikan sebagai kekuatan (modal) tata kelola LKM yang ideal, yang biasanya direpresentasikan melalui model pinjaman berkelompok (*joint liability lending*)¹³. Pengertian pinjaman berkelompok adalah model pinjaman dengan syarat calon debitur harus membentuk kelompok, dimana semua debitur saling bertanggung jawab terhadap pembiayaan masing-masing anggota kelompok. Pinjaman berkelompok juga dimaknai sebagai mekanisme penyaluran kredit yang diberikan berbasis kelompok, bukan model pinjaman langsung kepada individu (*individual lending*). Pinjaman berkelompok sering dimaknai sebagai tata kelola modal sosial untuk dijadikan instrumen dalam mengelola risiko kredit. Beragam penelitian membuktikan bahwa pinjaman berkelompok mampu mengatasi risiko kredit sekaligus menghapus eksklusivitas keuangan bagi masyarakat miskin¹⁴. Sementara penelitian yang

³ Bank Indonesia, 2016, Data Kredit Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Metadata), (Online) (<http://bi.go.id>, diakses 20 November 2018).

⁴ *Ibid.*

⁵ *Ibid.*

⁶ *Ibid.*

⁷ Badan Pusat Statistik, 2018, Kemiskinan dan Ketimpangan, (Online) (<http://bps.go.id>, diakses 20 November 2018).

⁸ *Ibid.*

⁹ Shoji Masahiro; Aoyagi Keitaro; Kasahara Ryuji; & Sawada Yasuyuki, "Social Capital Formation and Credit Access: Evidence from Sri Lanka," *World Development*, Vol 40(2), 2012, hlm. 2522-2536.

¹⁰ Li X; Gan C; & Hu B, "The Impact of Microcredit on Womens Empowerment: Evidence From China," *Journal of Chinese Economic and Business Studies*, Vol 9(3), 2011, hlm. 239-261.

¹¹ Laureti, C; & Hamp, C, "Innovative Flexible Products in Microfinance," *Savings and Development*, Vol 1, 2011, hlm. 97-129.

¹² Mourougane Annabelle, "Promoting SME Development in Indonesia," *OECD Economics Department Working Papers*, 2012, (995).

¹³ *Ibid.*

¹⁴ Madajewicz M, "Joint Liability Versus Individual Liability in Credit Contracts," *Journal of Economic Behavior and Organization*, Vol 77, 2011, hlm. 107-123.

lain mengemukakan bahwa keunggulan pinjaman berkelompok terletak pada kemampuan untuk membuat modal sosial masyarakat (debitur) miskin menjadi lebih kuat¹⁵. Penguatan tersebut dapat dihubungkan dengan mekanisme pemberdayaan sebagai faktor kunci keberhasilan program.

Atas persoalan tersebut, maka penelitian ini dimaksudkan untuk mencari model penyaluran kredit mikro yang ideal, yakni yang dapat menyediakan kredit yang mudah dan berbiaya murah dan mampu berdampak terhadap peningkatan kesejahteraan debitur miskin. Selain sebagai percontohan, model ini juga sangat penting kontribusinya bagi pemahaman yang lebih baik untuk mengisi kekosongan literatur dalam menjawab bagaimana mekanisme yang tepat untuk mengatasi risiko kredit mikro dalam mengelola debitur miskin. Untuk menjawab tantangan tersebut, penelitian ini menggunakan studi kasus pada model penyaluran kredit berkelompok (*lending groups*) yang dilakukan oleh Koperasi Mitra Manindo (KMM) yang berlokasi di Kabupaten Mandailing Natal, Sumatera Utara. KMM mengadopsi model pembiayaan berkelompok yang didapat dari sistem pembiayaan pola Grameen Bank yang berkembang pesat di Bangladesh. Pinjaman berkelompok KMM diyakini sebagai kekuatan modal sosial yang mampu meminimalisir risiko kredit.

Berdasarkan maksud di atas, maka tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana modal sosial yang dibentuk melalui mekanisme pinjaman berkelompok mampu menjadi kunci keberhasilan dalam meminimalisir risiko kredit mikro. Untuk menjawabnya, maka pengorganisasian dalam tulisan ini dibagi menjadi tiga tahapan, yaitu: (i) melihat peranan modal sosial melalui format pinjaman berkelompok terhadap peningkatan pendapatan anggota; (ii) melihat konstruksi modal sosial melalui format pinjaman berkelompok sehingga mampu mengurangi risiko kredit macet; dan (iii) usulan mekanisme modal sosial melalui format pinjaman berkelompok sebagai model pinjaman kredit mikro yang mampu meningkatkan kesejahteraan debitur miskin. Setelah bahasan ketiga ini adalah kesimpulan serta kontribusi penelitian.

Kritik Terhadap Tata Kelola Program Kredit Mikro

Secara konseptual, tujuan utama pelaksanaan kredit mikro selain mencari keuntungan (bunga), adalah untuk membantu masyarakat miskin selaku debitur agar mampu keluar dari status

kemiskinan¹⁶. Beberapa peneliti juga mengemukakan bahwa program kredit mikro secara prinsipal bertujuan untuk memerangi kemiskinan melalui penyediaan akses kredit yang menasar masyarakat berpendapatan rendah¹⁷. Kedua pendapat ini mengantarkan pada kesimpulan penting, bahwa tujuan utama program kredit mikro pada dasarnya adalah untuk membantu masyarakat miskin agar mampu meningkatkan pendapatan, membangun bisnis yang layak, mengurangi kerentanan terhadap guncangan ekonomi, dan perannya terhadap pengurangan kemiskinan.

Namun, tidak semua pelaku program kredit mikro memahami konsep tata kelola kredit mikro yang ideal sebagaimana dijelaskan di atas. Beberapa peneliti mengungkapkan ketidakpahaman para pelaku program kredit mikro akibat pengetahuan yang masih minim dari para pengelola¹⁸. Hal ini dibuktikan oleh beberapa studi empiris yang menemukan bahwa banyaknya LKM yang gagal karena rata-rata tidak paham terkait perbedaan antara tata kelola program kredit mikro dan tata kelola lembaga kredit keuangan lainnya, seperti perbankan¹⁹. Ketidakpahaman ini terutama terkait dengan bagaimana cara mengelola masyarakat miskin sebagai debitur agar mereka dapat mengembalikan pinjaman secara tepat waktu dan pendapatan mereka bisa meningkat. Hal ini rata-rata disebabkan oleh tata kelola LKM yang tidak mengerti bagaimana cara mengelola debiturnya untuk memanfaatkan peluang bisnis, mengatasi risiko pasar, dan tidak tahu bagaimana cara menguatkan modal sosial sebagai elemen penting dalam memberdayakan orang miskin²⁰. Tata kelola yang salah menyebabkan para pelaku program kredit mikro rata-rata menerapkan model tata kelola yang tidak berbeda jauh dengan lembaga kredit lainnya, seperti perbankan maupun rentenir. LKM yang

¹⁵ Riemsdijk M, "Critique of Microcredit as a Development Model," *Pursuit: The Journal of Undergraduate*, Vol 4(1), 2012, hlm. 109-117.

¹⁶ Microfinance Barometer, *Governances Towards a Fair and Sustainable World*, France: Microfinance Barometer, 2013, hlm. 12.

¹⁷ Dacanay J, "Learning Curve Spillover and Transactions Cost in The Microfinance Industry of The Philippines," *Entrepreneurship & Organization Managements*, Vol 4(3), 2015, hlm. 01-20.

¹⁸ Hadi MP, "Analisis Manajemen Strategi dan Sistem Tanggung Renteng Dalam Meningkatkan Sistem Pengendalian Intern dan Kinerja Koperasi di Provinsi Jawa Timur (Studi Pada Unit Simpan Pinjam Koperasi Wanita di Wilayah Provinsi Jawa Timur)," *Jurnal Ilmu Ekonomi dan Manajemen*, Vol 5(1), 2008, hlm. 23-30.

¹⁹ Khatun Fatema; & Hasan Mashudul, "Social Capital in Microfinance: A Critical Investigation of Bangladesh," *Journal of Emerging Trends in Economics and Management Sciences (JETEMS)*, Vol 6(5), 2015, hlm. 315-323.

²⁰ Visconti RM, "Microfinance VS Traditional Banking in Developing Countries," *Int. Journal Financial Innovation in Banking*, Vol 1(1), 2016, hlm. 42-61.

kurang tertata dengan baik kecenderungannya mirip seperti rentenir, sementara LKM yang sudah tertata dengan baik justru mirip seperti perbankan²¹.

Kritik lain menyampaikan bahwa penggunaan kredit mikro selama ini hanya dipraktikkan dalam menyalurkan dari segi jumlah pembiayaan saja, namun belum menyentuh karakter tata kelola, seperti orientasi organisasi/perusahaan, visi, dan segmentasi kredit²². Program kredit mikro rata-rata belum bisa menggunakan cara yang inovatif untuk mewujudkan beberapa karakter tersebut. Ketiadaan inovasi tata kelola program kredit mikro menyebabkan model operasionalisasinya justru berbiaya mahal (*high transaction cost*) dan produk yang dihasilkan tidak fleksibel, sehingga wilayah jangkauannya masih sangat terbatas. Rendahnya inovasi berdampak luas terhadap tidak masuknya masyarakat miskin dalam radar penyaluran kredit. Secara ideal, LKM seharusnya menerapkan model kredit yang berimbang, yakni yang bisa menyeimbangkan antara keuntungan dengan keadilan sosial²³. Penyaluran kredit yang dilaksanakan oleh LKM harus memiliki karakter sosial sebagai *double bottom line*, yakni keuntungan sebagai *first bottom line*, dan aspek sosial sebagai *second bottom line*. Bagaimanapun, secara ideal, pelaksanaan program kredit mikro mengacu pada organisasi atau perusahaan yang mempunyai pertimbangan analisa sosial sebagai dedikasi untuk menyediakan layanan kredit kepada warga miskin.

Tata Kelola Program Kredit Mikro yang Ideal: Pendekatan Modal Sosial

Tata kelola program kredit mikro yang ideal mengacu pada prinsip keseimbangan, yaitu penyaluran kredit mikro yang menguntungkan sekaligus mampu meningkatkan kesejahteraan debiturnya (masyarakat miskin). Prinsip ini banyak dimaknai sebagai tata kelola yang mengacu pada model yang bisa mengelola modal ekonomi dan modal sosial secara bersamaan²⁴. Secara teoritis, makna modal sosial adalah sumberdaya yang tersedia dalam masyarakat, khususnya yang menyangkut jaringan (*networks*), timbal balik

(*reciprocity*), dan kepercayaan (*trust*)²⁵. Selain itu, pengertian modal sosial adalah rangkaian proses hubungan antar manusia yang memungkinkan efisiensi dan efektivitas koordinasi dan kerjasama yang saling menguntungkan²⁶. Sedangkan pendapat lain mengartikan modal sosial sebagai serangkaian nilai atau norma informal pemberi teladan yang digunakan bersama di antara anggota-anggota sebuah kelompok yang memungkinkan mereka saling bekerjasama, dimana anggota-anggota kelompok berharap yang lain bisa bersikap dapat dipercaya²⁷. Makna modal sosial ini banyak dimanfaatkan sebagai praktik tata kelola kredit mikro yang berbasis kekuatan sosial sebagai modal berharga untuk memberdayakan debitur (masyarakat) miskin.

Penguatan modal sosial dalam kasus program kredit mikro sangat diperlukan karena LKM menyalurkan kredit kepada debitur miskin yang notabene tidak mempunyai modal lain selain modal sosial. Beberapa penelitian empiris menemukan bahwa karakteristik program kredit mikro yang berbasis anggota menjadi indikasi bahwa kekuatan lembaga tersebut terletak pada modal sosial²⁸. Jaringan anggota pada LKM dapat menjadi modal berharga untuk membangun modal sosial sebagai instrumen dalam melakukan transfer kesejahteraan. Teori modal sosial dan transfer kesejahteraan mengacu pada teori yang membedakan modal sosial sebagai ikatan (*bonding*) dan jembatan (*bridging*)²⁹. Modal sosial yang mengikat (*social capital bonding*) mengacu pada ikatan sosial yang kuat (jaringan, norma, dan kepercayaan) yang berkembang diantara individu atau kelompok serupa (homogen atau internal), contohnya seperti anggota keluarga atau masyarakat dekat. Beberapa studi menemukan bahwa orang dengan sumberdaya yang terbatas memanfaatkan peluang yang disediakan oleh anggota kelompok terdekat untuk bertahan³⁰. Meski demikian, tidak semua kelompok dekat bisa menyediakan sumberdaya yang cukup. Dampaknya, kelompok tersebut membutuhkan aksesibilitas sumberdaya eksternal atau kebutuhan atas jaringan di luar kelompok tersebut. Jaringan, norma, dan kepercayaan yang berkembang di antara jaringan

²¹ *Ibid.*

²² Bauer M; Chytilova J; & Morduch J, "Behavioral Foundations of Microcredit: Experimental and Survey Evidence from Rural India," *American Economic Review*, Vol 102(2), 2012, hlm. 1118-1139.

²³ *Ibid.*

²⁴ Giacomo DA; & Fabio S, "Disentangling the Relationship Between Nonprofit and Social Capital: The Role of Social Cooperatives and Social Welfare Associations in the Development of Networks of Strong and Weak Ties," *Munich Personal REPEC Archive*, No. 44860, 2013, hlm. 01-13.

²⁵ Hossain DM, "Social Capital and Microfinance: The Case of Grameen Bank, Bangladesh," *Middle East Journal of Business*, Vol 8(4), 2013, hlm. 12-20.

²⁶ *Ibid.*

²⁷ Postelnicu Luminta; & Hermes Niels, "Microfinance Performance and Social Capital: A Cross-Country Analysis," *J Bus Ethics*, Vol 10, 2016.

²⁸ *Ibid.*

²⁹ Viswanath PV, "Microfinance and Investment in Human and Social Capital," *ACRN Journal of Finance and Risk Perspective*, Vol 4(3), 2015, hlm. 81-101.

³⁰ *Ibid.*

eksternal digambarkan sebagai modal sosial yang menjembatani. Maka dari itu, modal sosial yang menjembatani (*social capital bridging*) adalah pemanfaatan jaringan eksternal dalam membuka peluang ekonomi yang lebih baik lagi bagi sesama kelompok internal.

Beberapa manfaat modal sosial di atas sangat penting sebagai pengganti agunan (kolateral) dalam memastikan tingkat pengembalian kredit. Modal sosial tersebut menguatkan beberapa studi empiris yang menunjukkan bahwa praktik-praktik komunitas (seperti LKM) yang dilakukan secara partisipatif berbasis modal sosial terbukti membantu mengubah kegiatan operasionalisasi (termasuk bisnis) menjadi lebih baik dan berdampak pada kenaikan tingkat kesejahteraan anggota. Dengan demikian, pengembangan kelompok dalam komunitas, yang dalam hal ini adalah kasus LKM, dapat direncanakan melalui pendekatan modal sosial (contohnya model pinjaman berkelompok) yang berimplikasi pada efisiensi ekonomi. Hal ini tidak terlepas dari teori mengenai interaksi sosial sebagai perwujudan dari aktivitas kelompok yang dilihat sebagai sumber yang sangat berpengaruh pada perkembangan individu (*individual development*) maupun pada *self concept*³¹. Pendekatan modal sosial tersebut juga dapat dijadikan landasan dalam membentuk pola pikir yang bisa dipakai dalam merancang pengelolaan efisiensi pada LKM. Efisiensi dapat diwujudkan karena modal sosial dapat berperan dalam pengurangan biaya transaksi, sehingga dapat berimplikasi terhadap kinerja ekonomi yang produktif.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan di Koperasi Mitra Manindo (KMM) yang berlokasi di Kabupaten Mandailing Natal, Provinsi Sumatera Utara. Alasan pemilihan KMM dapat dijabarkan menjadi dua alasan, yaitu:

1. KMM mampu memodifikasi kelembagaan program kredit mikro sehingga mampu menciptakan tingkat pengembalian kredit yang optimal, dimana rata-rata tingkat NPL selama lima tahun terakhir hanya 0,20 persen.
2. Segmentasi KMM benar-benar mampu menysasar kalangan miskin di desa-desa Mandailing Natal. Kabupaten Mandailing Natal selama ini dikenal sebagai kabupaten dengan tingkat kemiskinan tertinggi di Provinsi Sumatera Utara, yakni selama lima tahun terakhir (2013-2017) rata-rata tingkat kemiskinannya mencapai 11,58 persen, jauh lebih tinggi dari rata-rata Provinsi Sumatera Utara yang sebesar 9,28 persen.

Dua alasan tersebut sangat cocok dijadikan lokasi penelitian mengingat program pembiayaan mikro yang ideal harus diperuntukkan bagi rumah tangga miskin dan mampu dikelola dengan baik. Dari hasil lapang, data yang digunakan dari KMM meliputi data primer dan sekunder. Data primer digunakan untuk mendapatkan informasi dari aspek produksi dan lingkungan usaha dari para debitur melalui kuesioner dikombinasikan dengan metode *in-depth interview*. Sedangkan data sekunder didapat dari dokumen KMM yang berupa data jumlah anggota dan kuantitas output yang dihasilkan pada masing-masing debitur. Total ada 249 debitur baik anggota maupun non anggota yang dipilih dengan sampling kuota. Variabel-variabel yang tercantum dalam pertanyaan kuesioner meliputi aspek usia perusahaan/usaha, tata kelola kelembagaan, kondisi sosial, sarana dan prasarana, pemasaran, permodalan, ketenagakerjaan, teknologi inovasi, kemudahan perolehan bahan baku, serta profitabilitas. Variabel ini bersifat resiprokal ke kualifikasi utama dalam melihat tingkat keuntungan usaha anggota, yang meliputi akses bahan baku, akses modal, dan akses pemasaran.

Data yang diperoleh akan dilakukan analisis deskriptif statistik, yakni menggunakan jenis Analisis *Treatment Effect*, yakni metode yang digunakan untuk mengetahui peran pinjaman berkelompok (modal sosial) yang dilakukan oleh KMM dalam mendorong peningkatan pendapatan anggota yang berstatus sebagai masyarakat miskin yang memiliki usaha skala rumahan (mikro). Pemilihan *Treatment Effect* dalam penelitian ini mengacu pada penelitian terdahulu, dimana kasus yang hampir sama dilakukan jalan keluar dengan analisa yang juga sama. *Treatment Effect Model* memiliki dua persamaan yang diestimasi secara simultan, yaitu:

$$C_i = \gamma^c W_i^c + uC_i, \dots\dots\dots(1)$$

Persamaan tersebut digunakan untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi minat masyarakat miskin untuk bergabung dalam pinjaman berkelompok yang diadopsi oleh KMM. Adapun C dalam persamaan tersebut adalah peran debitur dalam pinjaman berkelompok, sedangkan W meliputi profitabilitas, akses bahan baku, akses permodalan, serta akses pasar. Sementara persamaan kedua adalah untuk mengetahui tingkat resiko kegagalan debitur dalam berusaha, dengan spesifikasi model sebagai berikut,

$$y_i = \beta^c X_i^c + \delta^c C_i + \epsilon_i \dots\dots\dots(2)$$

Dimana y adalah tingkat resiko usaha dari para debitur, C peran serta debitur dalam pembiayaan

³¹ Ibid.

berkelompok, dan X adalah faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat risiko usaha. Berdasarkan kedua persamaan tersebut, akan dapat diketahui bagaimana peran pinjaman berkelompok (modal sosial) dalam meningkatkan pendapatan (kesejahteraan) anggota.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Peran Modal Sosial (Pinjaman Berkelompok) Terhadap Peningkatan Pendapatan Anggota

Model penyaluran kredit mikro berbasis modal sosial melalui format pinjaman berkelompok merupakan instrumen yang sangat penting dalam pengembangan anggota Koperasi Mitra Manindo (KMM). Pembiayaan berkelompok mampu menciptakan keunggulan dalam mereduksi tingkat risiko pinjaman melalui pemahaman nilai-nilai organisasi yang berprinsip kebersamaan kepada seluruh anggota. Nilai-nilai yang dimaksud terutama menyangkut model pemberdayaan kelompok yang dilakukan atas dasar kekuatan kelompok.

Persamaan 1.

$$C = -0.72 - 0.12BB_3 - 0.02M_3 + 0.04P_2 + \epsilon$$

Dimana:

C = Keikutsertaan dalam pinjaman berkelompok

BB₃ = Indeks akses bahan baku

M₃ = Indeks akses modal

P₂ = Indeks akses pasar

Persamaan 2.

$$Y = 1.84 - 499050.3X_3 - 175016.5BB_2 + 8594481M_4 + 3.74C + \epsilon$$

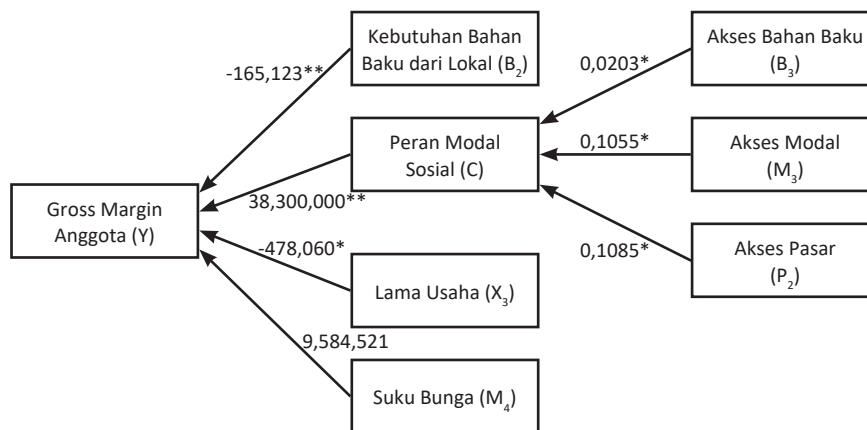
Dimana:

Y = *Gross margin* usaha anggota

X₃ = Lama usaha

BB₂ = Proporsi kebutuhan bahan baku berasal dari lokal

M₄ = Tingkat Suku Bunga



Sumber: Hasil Perhitungan Data Lapangan, 2017

Gambar 1. Hasil Perhitungan Peranan Modal Sosial (Pinjaman Berkelompok) Terhadap Peningkatan Usaha Anggota

Pinjaman berkelompok mampu menjadikan anggota memahami akan prinsip-prinsip KMM, seperti: (i) hubungan antara anggota dan organisasi lebih kepada konsep kemitraan, bukan hubungan debitur-kreditur; (ii) bisnis yang dijalankan oleh organisasi bukan hanya berdasarkan pada profit, tetapi juga makna kemakmuran yang lebih luas; dan (iii) KMM hanya melakukan investasi yang halal dan tidak menimbulkan kemudharatan (ketidakmanfaatan).

Atas beberapa alasan tersebut, maka penting untuk mengetahui faktor apa saja yang mempengaruhi minat masyarakat miskin (calon debitur) untuk menjadi anggota KMM. Secara statistik, faktor apa saja yang mempengaruhi minat masyarakat miskin dapat dianalisa melalui *Treatment Effect Model* melalui dua persamaan sebagai berikut:

Gambar 01 menunjukkan bahwa terdapat tiga faktor yang mempengaruhi minat masyarakat miskin (calon debitur) untuk menjadi anggota KMM, yaitu : (i) akses bahan baku, (ii) akses modal, dan (iii) akses pasar. Hasil persamaan simultan menunjukkan bahwa indeks bahan baku, modal, dan indeks akses pasar berpengaruh positif terhadap tingkat produktivitas usaha anggota. Data ini menunjukkan bahwa ketika semakin besar ketiga indeks tersebut, maka akan menyebabkan masyarakat miskin semakin tertarik untuk ikut menjadi anggota KMM yang menerapkan model pinjaman berkelompok. Hal ini mengindikasikan bahwa kecenderungan masyarakat miskin yang mempunyai skala usaha mikro untuk masuk dalam pinjaman berkelompok karena diharapkan model

tersebut mampu membantu akses bahan baku, modal, serta perluasan pangsa pasar. Peran penting pinjaman berkelompok dalam meningkatkan pendapatan anggota dapat dilihat dari *gross margin* (profit), yang dipengaruhi oleh empat faktor, yaitu: (i) tingkat suku bunga, (ii) lama usaha, (iii) proporsi kebutuhan bahan baku berasal dari lokal, dan (iv) peran pinjaman berkelompok sebagai representasi modal sosial. Hasil perhitungan menunjukkan bahwa dampak pinjaman berkelompok merupakan faktor determinan dari tingkat profitabilitas usaha anggota. Tingkat profitabilitas yang tinggi mencerminkan usahanya berkembang dengan cukup baik. Usaha yang berkembang diyakini sebagai landasan (kekuatan) mengapa tingkat risiko kredit macet di KMM sangat kecil. Selain itu, pinjaman berkelompok diyakini mampu mengintroduksi nilai-nilai kelompok yang selaras dengan prinsip-prinsip ekonomi produktif, sehingga tingkat kepatuhan angsuran menjadi meningkat, dan skala usaha anggota bisa berkembang secara lebih baik.

B. Bagaimana Konstruksi Modal Sosial (Pinjaman Berkelompok) Mampu Mengurangi Risiko Kredit Macet?

Temuan dalam Gambar 01 membuktikan bahwa model pinjaman berkelompok mampu mengurangi risiko kredit macet yang telah disalurkan oleh KMM. Keberhasilan pengelolaan risiko kredit disebabkan kemampuan pinjaman berkelompok dalam menunjang kinerja usaha anggota, sehingga tingkat pendapatan anggota menjadi meningkat. Temuan ini memperkuat beragam penelitian sebelumnya, yang menjelaskan bahwa modal sosial yang dikelola secara baik dapat mendorong anggotanya untuk menggunakan sumberdaya mereka secara efisien, sehingga menghasilkan kinerja yang unggul³². Penelitian lain juga mengemukakan bahwa modal sosial dalam model pinjaman berkelompok terbukti mampu meningkatkan orientasi untuk membagi pengetahuan, sehingga menciptakan efisiensi perusahaan secara individu³³. Hal ini menjadi keuntungan kompetitif dari kontribusi individu terhadap kepentingan bersama, disamping kontribusinya terhadap nilai tambah melalui inovasi dan proses kreativitas, sehingga berimplikasi terhadap kinerja ekonomi³⁴.

Kemampuan pinjaman berkelompok dalam meningkatkan kinerja ekonomi anggota KMM tidak terlepas dari perjalanan pinjaman berkelompok yang dibentuk berdasarkan mekanisme yang di desain agar bisa bertahan dalam jangka panjang, yakni mulai dari pra pembentukan sampai dengan pasca pembentukan. Beragam proses yang dilakukan oleh KMM terbukti mampu menciptakan nilai-nilai dalam pinjaman berkelompok. Nilai yang muncul telah berperan sebagai konstruksi modal sosial yang tertanam, sehingga berimplikasi kepada kinerja individu anggota. Pernyataan ini dieksplorasi berdasarkan temuan penelitian terdahulu, dimana proses pembentukan kelompok merupakan sebuah proses pengaturan kelembagaan, yang kemungkinan besar dapat diwujudkan karena ada unsur pengikat dan sistem yang dibuat dengan sengaja agar transaksi dapat berhasil, khususnya dalam memobilisasi sumberdaya untuk mengubah atau membuat kinerja anggota LKM menjadi lebih baik³⁵.

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara mendalam, pembentukan pinjaman kelompok yang dilakukan oleh KMM dapat dibedakan menjadi 4 (empat) tahap, yaitu: (i) tahap awal, yaitu tahap sosialisasi program, yang bertujuan memetakan karakteristik masyarakat sasaran; (ii) kedua adalah tahap keterikatan, yaitu menanamkan nilai-nilai modal sosial dalam kelompok; (iii) ketiga adalah tahap pengembangan, yaitu memperkokoh modal sosial dalam aktivitas pinjaman berkelompok; dan (iv) keempat adalah tahap penguatan, yaitu pelaksanaan aktivitas pemberdayaan dalam aktivitas pinjaman berkelompok. Keempat tahap ini merupakan satu kesatuan yang dilaksanakan oleh pengelola KMM, terutama diserahkan kepada Petugas Lapangan (PL) yang berperan sebagai pendamping lapangan ketika kegiatan berkelompok dilakukan.

Keempat tahap tersebut menghasilkan nilai kelompok (terutama dihasilkan pada tahap pengikatan program), yaitu menanamkan nilai-nilai modal sosial dalam kelompok. Nilai modal sosial dapat tercipta karena intensitas pertemuan kelompok, yang dilakukan dua kali dalam seminggu. Nilai modal sosial juga tercipta karena rasa kebersamaan yang terus dipupuk melalui intensitas pertemuan, pendampingan, dan pembinaan oleh KMM. Nilai-nilai modal sosial yang dimaksud terdiri dari 6 (enam) nilai, yaitu: (i) nilai kebersamaan; (ii) nilai keterbukaan; (iii) nilai musyawarah; (iv) nilai saling percaya; (v) nilai disiplin; dan (vi) nilai tanggung

³² Hessel J; & Parker SC, "Constraint, International and Growth: A Cross-Country Analysis of European SMEs," *Journal of World Business*, Vol 48, hlm. 137-148.

³³ Haug E, "Entrepreneurial Talent and Venture Performance: A Meta-Analytic Investigation of SMEs," *Research Policy*, Vol 42, 2013, hlm. 1251-1273.

³⁴ *Ibid.*

³⁵ Khavul Susana; Chaves Helmuth; & Brutton Garry, "When Institutional Change Outruns the Change Agent: The Contested Terrain of Entrepreneurial Microfinance for Those in Poverty," *Journal of Business Venturing*, Vol 28, 2013, hlm. 30-50.

jawab. Keenam nilai tersebut telah berdampak pada dua hal penting, yaitu: (i) perubahan perilaku anggota; dan (ii) berkembangnya usaha anggota. Dampak tersebut didukung dengan aktivitas pemberdayaan seperti pembinaan dan pendampingan. Keberhasilan penanaman nilai-nilai terbukti dari rendahnya rata-rata tingkat NPL selama lima tahun terakhir yang hanya 0,20%, dan keberhasilan peningkatan pendapatan anggota (penjelasan Gambar 01). Beberapa tahap tersebut mencerminkan bahwa mekanisme pinjaman berkelompok telah berhasil merubah perilaku atau kebiasaan anggota menjadi lebih baik. Temuan ini sejalan dengan temuan penelitian sebelumnya, dimana model pinjaman berkelompok yang banyak tersebar pada LKM model Grameen Bank telah menjadi percontohan dalam merubah kedisiplinan, tanggung jawab, dan kinerja usaha masing-masing anggota³⁶.

Konstruksi pembentukan modal sosial yang dilakukan oleh KMM merupakan sebuah fenomena sosial yang berimplikasi pada kinerja ekonomi. Secara teoritis, hal tersebut merupakan penjelasan dari teori kerelaan dalam aktivitas ekonomi. Dalam konteks ini, kesadaran dapat berubah menjadi sistem kerelaan (*voluntary system*) dalam operasionalisasi lembaga keuangan mikro berbasis partisipasi. Konsep kerelaan mendukung gagasan yang telah lama berkembang, bahwa asosiasi sukarela (*voluntary associations*) sering dianggap berasal dari peranan penting dari pembentukan modal sosial³⁷.

Selain teori kerelaan, pendekatan lain juga dikaitkan dengan adanya basis jaringan. Kelompok jaringan yang dipraktikkan di banyak lembaga keuangan mikro dengan kekuatan kelompok (modal sosial) terbukti telah berhasil menanamkan nilai dan menghasilkan sebuah aksi moralitas sehingga membuahkan ikatan emosi secara kuat, kinerja yang solid, dan kebersamaan yang sulit untuk dipisahkan³⁸. Pinjaman berkelompok dapat berperan untuk menuju penerapan organisasi jejaring (*networking organization*) yang penting bagi peningkatan kapasitas internal organisasi³⁹. Pinjaman berkelompok juga mampu mengembangkan jaringan yang sangat

bermanfaat dalam menciptakan aksesibilitas yang lebih baik seperti aspek permodalan, produksi, dan pasar. Beberapa aksesibilitas tersebut sangat dibutuhkan anggota (debitur) yang notabene adalah masyarakat miskin dengan segala keterbatasannya.

Kasus di KMM juga mengindikasikan bahwa dinamika kelembagaan dalam pinjaman berkelompok dapat dikatakan sebagai sebuah proses yang telah berdampak pada perubahan perilaku anggota dan secara esensial telah merekonstruksi budaya lokal yang sebelumnya konservatif. Temuan ini konsisten dengan penelitian terdahulu, bahwa tata kelola yang menekankan pada pemahaman hubungan sosial yang bersifat informal maupun formal dapat berpengaruh terhadap kinerja anggota yang lebih baik, khususnya dalam merubah perilaku yang lebih produktif⁴⁰. Keberhasilan lembaga keuangan mikro dalam merubah perilaku anggota rata-rata terletak pada kesederhanaan pengaturan kelembagaan dan standarisasi untuk merangsang kedisiplinan pembiayaan⁴¹.

Penanaman nilai kedisiplinan mendorong debitur melakukan pembayaran secara tepat waktu dan meningkatkan pengelolaan keuangan harian. Dalam teori keuangan mikro, penanaman kedisiplinan telah mengurangi persoalan keagenan (*agency problems*), persoalan informasi asimetris, dan perilaku *moral hazard* yang sangat bisa muncul dengan probabilitas yang tinggi⁴². Persoalan *moral hazard* dalam teori keuangan mikro dikenal sebagai *ex post moral*, yakni yang dibiayai terlalu sedikit berusaha dalam mewujudkan proyek bisnisnya dan karenanya mengkompromikan pengganti pembiayaan berikutnya. Dalam persoalan *ex post moral*, yang dibiayai gagal membayar pembiayaannya walaupun dia mampu untuk membayarnya. Banyak kasus kegagalan program pembiayaan mikro dikarenakan kurangnya penanaman kedisiplinan, yang diperburuk oleh masalah keagenan serta tidak adanya kolateral, ditambah dengan mekanisme penegakan hukum (*law of enforcement*) yang kurang memadai. Padahal, nilai kedisiplinan sangat penting untuk mengendalikan perilaku dalam menunda-nunda angsuran, sebagai pengendalian diri, dan untuk menghindari perilaku

³⁶ *Ibid.*

³⁷ Majee Wilson; & Hoyt Ann, "Cooperative and Community Development: A Perspective on the Use of Cooperatives in Development," *Journal of Community Practice*, Vol 19(1), 2011, hlm. 48-61.

³⁸ Goldberg N, "Measuring The Impact of Microfinance: Taking Stock of What We Know, USA: Grameen Foundation, hlm. 23.

³⁹ Giacomo DA; & Fabio S, "Disentangling the Relationship Between Nonprofit and Social Capital: The Role of Social Cooperatives and Social Welfare Associations in the Development of Networks of Strong and Weak Ties," *Munich Personal Repec Archive*, 2013, No 44860.

⁴⁰ Araujo SV; & Taylor SN, "The Influence of Emotional and Social Competencies on The Performance of Peruvian Refinery Staff," *Cross Cultural Management*, Vol 19(1), 2012, hlm. 23-34.

⁴¹ Labie M; Laureti C; & Szafarz A, "Discipline and Flexibility: A Behavioral Perspective On Product Design in Microfinance," *Centre Emile Bernheim, Research Institute in Management Sciences*, Vol 15 (020), 2015, hlm. 234-240.

⁴² Habib M; & Jubb C, "Role of Microfinance in Political Empowerment of Women: Bangladesh Experience," *Journal International Journal of Sustainable Development*, Vol 5(5), 2012, hlm. 99-110.

inkonsistensi waktu yang sangat berisiko muncul pada model pembiayaan tanpa kolateral⁴³.

Penjelasan di atas juga mendukung apa yang sering dikemukakan oleh banyak peneliti, bahwa kasus pada lembaga pembiayaan mikro, perubahan perilaku anggota paling efektif jika dilakukan melalui pembentukan kelompok⁴⁴. Kasus di KMM, pinjaman berkelompok merupakan representasi dari modal sosial yang sangat menentukan rasa pertanggungjawaban bersama atas pembiayaan yang diberikan. Hal ini sesuai dengan penelitian terdahulu, yang menekankan bahwa pemberian pembiayaan kelompok dengan tanggung jawab bersama dapat menyebabkan sistem monitoring yang efektif diantara anggota kelompok sehingga dapat mengurangi masalah *moral hazard* dan mengatasi lemahnya sistem penegakan aturan⁴⁵. Alasannya bahwa komponen tanggung jawab yang dilakukan secara bersama dapat memberikan insentif kepada peminjam untuk mendorong mereka agar memilih proyek investasi (jenis usaha) yang lebih aman. Kelompok disini merupakan media untuk menegakan aturan main, yakni dikatakan bahwa aturan main adalah sebagai suatu cara untuk merubah perilaku ekonomi yang selalu di bawah ketidakpastian (*under uncertainty*)⁴⁶. Dalam konteks ini, model pengorganisasian sangat berperan dalam menentukan pengelolaan perubahan perilaku baik dari aspek regulatif, normatif, dan kognitif. Perubahan perilaku ditentukan oleh pengaturan kelembagaan yang memuat nilai, norma, dan kewajiban yang diatur oleh kebijakan lembaga yang dapat mendukung kinerja ekonomi baik di level individu maupun organisasi.

C. Mekanisme Pinjaman Berkelompok Sebagai Model Tata Kelola Kredit Mikro yang Ideal

Konstruksi (tahapan) pembentukan pinjaman berkelompok yang dilakukan oleh KMM dapat dijadikan sebagai model dalam menerapkan tata kelola kredit mikro yang ideal. Pada tahap awal, KMM menyadari bahwa menyalurkan kredit mikro kepada masyarakat miskin sangatlah berisiko mengalami kegagalan angsuran. Namun di satu sisi, LKM yang ideal dituntut harus memiliki watak kewirausahaan sosial sehingga orang miskin wajib menjadi target

asaran mereka. Untuk itu, KMM membuat desain untuk dapat mereduksi tingkat risiko yang melekat pada peminjam miskin, yakni dalam hal ini adalah melalui mekanisme pinjaman berkelompok. Mekanisme pinjaman berkelompok merupakan rekayasa sosial dimana di dalamnya tertanam modal sosial sebagai kekuatan yang berusaha dioptimalkan dari debitur miskin.

Untuk melaksanakan pinjaman berkelompok, harus dilakukan supervisi (monitoring) berupa penyediaan Petugas Lapang (PL) atau Pendamping Ahli yang paham akan prinsip-prinsip pemberdayaan, yang bertugas sebagai mediator antara anggota dan LKM. Fungsi mediator dan LKM adalah untuk melakukan 3 (tiga) aktivitas penting pereduksi risiko pembiayaan miskin, yaitu sebagai penyaringan, monitoring, dan penegakan aturan. Pembiayaan berkelompok dan pelaksanaan ketiga fungsi tersebut dilakukan melalui dua pemrosesan, yaitu adanya pemberdayaan dan aktivitas yang bisa menguatkan modal sosial kelompok. Dengan adanya tata kelola ini, diharapkan dapat mereduksi biaya transaksi jangka panjang, disamping agar aktivitas penyaringan, monitoring dan penegakan aturan dapat berjalan secara efektif. Kondisi demikian diharapkan dapat berdampak pada berkurangnya *adverse selection*, *moral hazard*, dan sekaligus menguatkan penegakan aturan. Jika semua desain ini berhasil, maka tingkat suku bunga tidak mungkin akan naik karena risiko kegagalan dapat diminimalisir seoptimal mungkin. Kondisi demikian menjadikan KMM mampu menyediakan kredit yang inklusif, karena ekspansi pinjaman disegmentasikan kepada orang miskin. Penjelasan ini merupakan desain kelembagaan yang dalam prosesnya harus dilakukan sebagaimana diilustrasikan dalam Gambar 2.

Gambar 2 setidaknya dapat menjadi jawaban untuk mengisi kelangkaan literatur mengenai tata kelola LKM yang ideal. Selama ini, kinerja LKM rata-rata tidak optimal karena kelangkaan rujukan literatur mengenai tata kelola yang ideal. Persoalan kelangkaan berimplikasi pada kegagalan mayoritas LKM dalam meningkatkan kesejahteraan anggota. Persoalannya terletak pada rendahnya tingkat pendapatan masyarakat miskin (anggota miskin) yang ditandai dengan biaya transaksi dan risiko yang tinggi, arus informasi yang lemah, dan lingkungan kelembagaan yang rapuh. Pendapat lain juga mengungkapkan bahwa peningkatan biaya transaksi (karena kegagalan LKM dalam mereduksi biaya transaksi) telah menghalangi anggota miskin untuk masuk dalam kompetisi pasar⁴⁷. Hal inilah

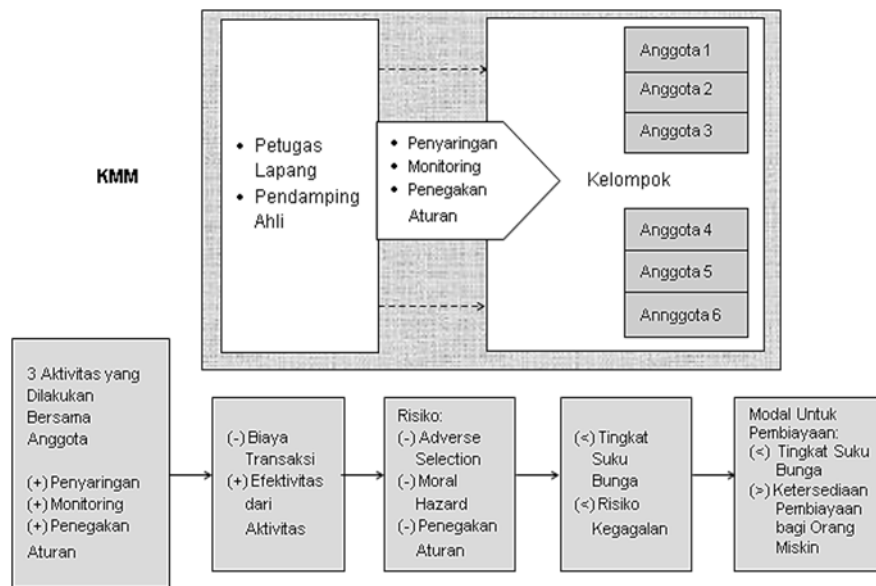
⁴³ *Ibid.*

⁴⁴ Sagoe D, "Precidents and Prospects in The Uses of Focus Group in Social and Behavioral Science Research," *The Qualitative Report*, Vol 17(3), 2012, hlm. 1-16.

⁴⁵ *Ibid.*

⁴⁶ Dequech D, "The New Institutional Economics and The Theory of Behaviour Under Uncertainty," *Journal of Economic Behaviour & Organization*, Vol 59, 2016, hlm. 109-131.

⁴⁷ Cuevas AC, "Transaction Costs of Exchange in Agriculture: A Survey," *Asian Journal of Agriculture and Development*, Vol 11(1), 2015, hlm. 22-37.



Sumber: Hasil Pemikiran Berdasarkan Temuan Lapang, 2018

Gambar 2. Mekanisme Pinjaman Berkelompok Sebagai Model Tata Kelola Kredit Mikro yang Ideal

yang terjadi pada segmentasi anggota pembiayaan mikro yang berstatus sebagai orang miskin. LKM selama ini gagal dalam menutupi kelemahan orang miskin karena ketidakmampuan dalam merancang tata kelola sehingga tidak dapat membantu aktivitas ekonomi anggotanya menjadi lebih baik.

Gambar 02 juga dapat menjadi jawaban bagaimana mengelola debitur miskin yang selama ini penuh dengan keterbatasan. Beberapa peneliti telah menjelaskan bahwa anggota miskin dari anggota LKM yang gagal rata-rata masih mempunyai keterbatasan terhadap akses sumberdaya sehingga berpengaruh terhadap pengambilan keputusan⁴⁸. Persoalan kegagalan LKM dalam mensejahterakan debiturnya dapat menghambat anggota secara individu maupun rumah tangga, dan gilirannya akan menghambat kegiatan dan produktivitas ekonominya⁴⁹. Implikasinya, aktivitas ekonomi yang dapat diperbuat menjadi rendah, koordinasi tidak memadai, risiko menjadi tinggi, dan biaya satuan aktivitas ekonomi yang dijalankan menjadi tinggi. Persoalan ini diistilahkan dengan tingkat yang sangat rendah akibat perangkat ekuilibrium (*low level equilibrium trap*). Dalam beragam kasus penelitian, keadaan seperti ini menjadikan anggota miskin sulit keluar dari kondisi kemiskinan akibat terkungkung dalam perangkat masih lemahnya aspek kelembagaan.

Gambar 02 setidaknya juga dapat menjawab atas keterbatasan analisa generalisasi terkait urgensi modal sosial dalam sebuah institusi keuangan.

Landasan kolektivitas berprinsip kebersamaan yang dicerminkan oleh pinjaman berkelompok dapat mengajukan proposisi penting bahwa analisa modal sosial pada dasarnya lebih mendeterminasi dalam setiap analisa kinerja LKM yang ideal. Analisa ini jelas berbeda dengan lembaga keuangan lain yang lebih menitikberatkan pada kedalaman analisa mikro sebagai entitas sebuah perusahaan. Kekuatan modal sosial dalam analisa keuangan mikro adalah sebagai sistem yang dapat memuat tanggung jawab secara bersama diantara anggota dalam satu kelompok atas segala kewajiban anggota pada lembaga pembiayaan mikronya dengan dasar keterbukaan dan saling mempercayai⁵⁰. Dalam konteks ini, modal sosial pada analisa keuangan mikro dapat dilihat dari 4 (empat) komponen, yaitu: (i) adanya kekuatan kebersamaan; (ii) adanya tanggung jawab secara kolektif; (iii) menekankan pada kepercayaan antar anggota; dan (iv) pentingnya sebuah jaringan antar anggota maupun jaringan eksternal. Pada akhirnya, semua penjelasan di atas dapat mengantarkan pada kesimpulan penting, bahwa analisa modal sosial merupakan salah satu cara untuk mengantarkan pembentukan sebuah LKM yang ideal. Kondisi ideal adalah LKM yang mampu menciptakan sistem keuangan yang inklusif, yakni yang mampu menyediakan kredit yang mudah dan berbiaya murah kepada masyarakat miskin, sekaligus mampu mensejahterakannya.

KESIMPULAN

Berdasarkan analisa *Treatment Effect*, terdapat tiga faktor yang mempengaruhi minat masyarakat

⁴⁸ *Ibid.*

⁴⁹ Singh N, "Transaction Cost, Information Technology and Development," *Indian Growth and Development Review*, Vol 1(2), 2018, hlm. 212-236.

⁵⁰ *Ibid.*

miskin untuk menjadi anggota KMM, yaitu: (i) akses bahan baku, (ii) akses modal, dan (iii) akses pasar. Hasil persamaan simultan menunjukkan bahwa indeks bahan baku, modal, dan indeks akses pasar berpengaruh positif terhadap tingkat pendapatan anggota. Peran penting pinjaman berkelompok dalam meningkatkan pendapatan dapat dilihat dari *gross margin* (profit), yang dipengaruhi oleh empat faktor, yaitu: (i) tingkat suku bunga, (ii) lama usaha, (iii) proporsi kebutuhan bahan baku berasal dari lokal, dan (iv) peran pinjaman berkelompok sebagai representasi modal sosial. Hasil perhitungan menunjukkan bahwa dampak pinjaman berkelompok merupakan faktor determinan dari tingkat profitabilitas usaha anggota. Keberhasilan tersebut disebabkan keunggulan pinjaman berkelompok yang mampu menciptakan nilai-nilai modal sosial, yaitu: (i) nilai kebersamaan; (ii) nilai keterbukaan; (iii) nilai musyawarah; (iv) nilai saling percaya; (v) nilai disiplin; dan (vi) nilai tanggung jawab. Keenam nilai tersebut telah berdampak pada dua hal penting, yaitu: (i) perubahan perilaku anggota; dan (ii) berkembangnya usaha anggota.

Maka dari itu, terdapat sintesa penting antara realitas dengan teori sehingga mekanisme pinjaman berkelompok dapat menjadi model dalam merancang pengaturan LKM yang ideal. Sintesa yang dimaksud adalah kasus KMM dapat menjadi percontohan bahwa mengelola program kredit mikro dibutuhkan pengaturan kelembagaan yang berbeda dengan lembaga keuangan lain (misal bank). Dalam tata kelola program kredit mikro, dibutuhkan pengaturan kelembagaan yang berciri aktivitas pemberdayaan yang berorientasi menguatkan modal sosial antar anggota yang notabene sebagai masyarakat miskin. Aktivitas ini dilakukan atas aktivitas-aktivitas yang berpegang teguh pada prinsip egalitarian. Temuan penting dalam penelitian bahwa modal sosial merupakan faktor determinan penentu keberhasilan dalam mensejahterakan orang miskin. Modal sosial juga merupakan konstruksi yang bisa diciptakan, bukan suatu modal yang tertanam dalam sebuah kelompok. Hal ini mempertegas pendapat bahwa dalam mengelola program kredit mikro dibutuhkan komitmen manajemen dalam melakukan kewirausahaan sosial dan kecakapan dalam melakukan aktivitas pemberdayaan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Goldberg, N. (2015). *Measuring The Impact of Microfinance: Taking Stock of What We Know*. USA: Grameen Foundation.

Microfinance Market Outlook. (2013). *No Sudden Stop: Demand for Microfinance Soars*, Zurich: Responsibility Investment AG.

Microfinance Barometer. (2013). *Governances Towards a Fair and Sustainable World*. France: Microfinance Barometer.

Jurnal

Araujo, S.V, & Taylor, S.N. (2012). The Influence of Emotional and Social Competencies on The Performance of Peruvian Refinery Staff, *Cross Cultural Management*, Vol. 19(1).

Bauer, M., Chytilova, J., & Morduch, J. (2012). Behavioral Foundations of Microcredit: Experimental and Survey Evidence from Rural India, *American Economic Review*, 102(2), 1118–1139.

Cuevas, A.C. (2015). Transaction Costs of Exchange in Agriculture: A Survey, *Asian Journal of Agriculture and Development*, Vol. 11(1), 22-37.

Dacanay, J. (2015). Learning Curve Spillovers and Transactions Cost in The Microfinance Industry of The Philippines, *Entrepreneurship & Organization Managements*, Vol. 4(3), 01-20.

Dequech, D. (2016). The New Institutional Economics and The Theory of Behaviour Under Uncertainty, *Journal of Economic Behaviour & Organization*, Vol. 59, 109-131.

Habib, M., & Jubb, C. (2012). Role of Microfinance in Political Empowerment of Women: Bangladesh Experience, *OIDA International Journal of Sustainable Development*, Vol. 5(5), 99-110.

Hadi, M.P. (2008). Analisis Manajemen Strategi dan Sistem Tanggung Renteng dalam Meningkatkan Sistem Pengendalian Intern dan Kinerja Koperasi di Provinsi Jawa Timur (Studi Pada Unit Simpan Pinjam Koperasi Wanita di Wilayah Provinsi Jawa Timur), *Jurnal Ilmu Ekonomi dan Manajemen*, Vol. 5(1).

Haug, E. (2013). Entrepreneurial Talent and Venture Performance: A Meta-Analytic Investigation of SMEs, *Research Policy*, Vol. 42, 1251-1273.

- Hessels, J., Parker, S.C. (2013) Constraint, Internationalization and Growth: A Cross-Country Analysis of European SMEs, *Journal of World Business*, Vol. 48, 137-148.
- Hossain, D.M. (2013). Social Capital and Microfinance: The Case of Grameen Bank, Bangladesh, *Middle East Journal of Business*, Vol. 8(4), 12-20.
- Khatun, F; & Hasan, M. (2015). Social Capital in Microfinance: A Critical Investigation of Bangladesh, *Journal of Emerging Trends in Economics and Management Sciences (JETEMS)*, Vol 6(5), 315-323.
- Khavul, Susanna; Chaves, Helmuth; Brutton, Garry D. (2013). When Institutional Change Outruns the Change Agent: The Contested Terrain of Entrepreneurial Microfinance for Those in Poverty, *Journal of Business Venturing*, Vol. 28, pp. 30-50.
- Labie, M., Laureti, C., & Szafarz, A. (2015). Discipline and Flexibility: A Behavioral Perspective on Product Design in Microfinance, *Centre Emile Bernheim, Research Institute in Management Sciences*, Vol. 15(020).
- Laureti, C., & Hamp, M. (2011). Innovative Flexible Products in Microfinance, *Savings and Development*, Vol. 1, 97-129.
- Li, X., Gan, C., & Hu, B. (2011). The Impact of Microcredit on Womens Empowerment: Evidence from China, *Journal of Chinese Economic and Business Studies*, Vol. 9(3), 239-261.
- Madajewicz, M. (2011). Joint Liability Versus Individual Liability in Credit Contracts, *Journal of Economic Behavior and Organization*, Vol. 77, 107-123.
- Majee, Wilson & Hoyt, Ann. (2011). Cooperatives and Community Development: A Perspective on the Use of Cooperatives in Development, *Journal of Community Practice*, Vol. 19(1), 48-61.
- Postelnicu Luminta; & Hermes Niels. (2016). Microfinance Performance and Social Capital: A Cross-Country Analysis, *J Bus Ethics*, Vol 10.
- Riemsdijk, M. (2012). Critique of Microcredit as A Development Model, *Pursuit: The Journal of Undergraduate*, Vol. 4(1), 109-117.
- Sagoe, D. (2012). Precients and Prospects in The Uses of Focus Group in Social and Behavioral Science Research, *The Qualitative Report*, Vol. 17(3), 1-16.
- Shoji, M; Aoyag, K; Kasahara, R; & Sawada, Y. (2012). Social Capital Formation and Credit Access: Evidence from Sri Lanka, *World Development*, Vol. 40(2), 2522-2536.
- Singh, N. (2018). Transaction Costs, Information Technology and Development, *Indian Growth and Development Review*, Vol. 1(2), 212-236.
- Visconti, R.M. (2016). Microfinance vs. tradisional banking in developing countries, *Int. J. Financial Innovation in Banking*, Vol. 1(1), 42-61.
- Viswanath PV. (2015). Microfinance and Investment in Human and Social Capital, *ACRN Journal of Finance and Risk Perspective*, Vol 4(3), 81-101.

Makalah

- Mourougane, A. "Promoting SME Development in Indonesia", *OECD Economics Department Working Papers*, No. 995, OECD Publishing, 2012.
- Giacomo, D.A., & Fabio, S. "Disentangling the Relationship Between Nonprofit and Social Capital: The Role of Social Cooperatives and Social Welfare Associations in the Development of Networks of Strong and Weak Ties" *Munich Personal RePEc Archive*, Paper No. 44860, 2013.

Internet

- Badan Pusat Statistik, 2018, Kemiskinan dan Ketimpangan, (Online) (<http://bps.go.id>, diakses 20 November 2018).
- Bank Indonesia, 2016, Data Kredit Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Metadata), (Online) (<http://bi.go.id>, diakses 20 November 2018).